



Analisis GCG Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara

M. Iqbal, MA

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Ade Syafitri

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Ria Tifanny Tambunan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Zulfa Khoiriah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. Williem Iskandar Ps. V Medan, Sumatera Utara

Korespondensi penulis: moehammadiqbaldooly78@gmail.com

Abstrak. This mini study aims to investigate the potential benefits of improved corporate governance for the financial performance of PT. PLN (Persero) North Sumatra Region. This study employs a descriptive methodology, collecting and analyzing data in order to produce organized descriptions, visuals, and connections between the phenomena under investigation. To acquire a broad comprehension of how Good Corporate Governance (GCG) has been implemented to improve financial performance at PT. PLN (Persero) North Sumatra Region, a descriptive qualitative research study was done. There results of here search demonstrate that the use of GCG at PT. PLN (Persero) North Sumatra Region to improve the company's financial performance does not always substantiate claims about the company's overall performance.

Keywords: Good Corporate Governance; Financial Performance

Abstrak. Penelitian kecil ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara PT. Kinerja keuangan PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara dan tata kelola perusahaan yang kuat. Pelajaran ini menggunakan metodologi deskriptif, mengumpulkan dan menganalisis data untuk menghasilkan deskripsi terorganisir, visual, dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Untuk memperoleh pemahaman secara umum mengenai bagaimana penerapan Penelitian deskriptif kualitatif dilakukan untuk mengetahui dampak tata kelola perusahaan yang baik (GCG) terhadap kinerja keuangan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa PT. Penerapan GCG PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara meningkatkan kinerja keuangan usaha tidak selalu membuktikan klaim mengenai kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Kata Kunci: Good Corporate Governance; Kinerja Keuangan

PENDAHULUAN

Status perekonomian di Indonesia saat ini mengalami krisis berkepanjangan dapat berdampak pada perkembangan perusahaan. Badan usaha milik negara juga swasta bisa gagal karena tidak mampu mempertahankan eksistensinya, yang menjadi salah satu alasan mengapa daya beli konsumen dan harga produk meningkat menurun. Meskipun hal ini terjadi, bisnis pada umumnya ingin menghasilkan keuntungan. Namun, untuk menghasilkan keuntungan, suatu bisnis harus mampu bersaing, sehingga mendorong bisnis untuk meningkatkan kualitas barang dan jasanya.

Sumber informasi mengenai keadaan mengenai hasil keuangan perusahaan adalah laporan keuangannya. Informasi keuangan tentang perusahaan diperiksa secara lebih rinci untuk mengumpulkan data yang akan membantu membenarkan pilihan yang diambil. Untuk membandingkan laporan keuangan dan mendukung tingkat akurasi analisis, semua data keuangan terkait dan prosedur yang ditetapkan harus disertakan dalam laporan keuangan ini. Neraca perusahaan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas merupakan beberapa analisis keuangan yang diperlukan untuk mengetahui kinerja PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang situasi keuangan dan pencapaian perusahaan yang bersangkutan, laporan keuangan adalah sumber daya yang penting. Melalui proses analisis elemen-elemen neraca, Anda dapat memastikan atau mengetahui situasi finansial. Tinjauan tentang hasil atau pertumbuhan bisnis perusahaan terkait akan diberikan sementara melalui pemeriksaan laporan laba rugi. Kapasitas suatu bisnis untuk mencapai profitabilitas dan aktivitas bisnis internal menentukan seberapa efektif dan efisien bisnis tersebut beroperasi. Oleh karena itu, keberhasilan finansial yang telah dicapai dapat digambarkan melalui penerapan analisis rasio keuangan. Pelaku bisnis harus memeriksa laporan keuangan untuk mengetahui lebih lanjut status keuangan organisasi yang bersangkutan guna mendukung kelangsungan dan kemajuan bisnis.

Saat ini, 47.532 karyawan dari seluruh Indonesia bekerja di PLN; 15,6% dari mereka memiliki gelar sarjana dan pascasarjana. Guna memahami perlunya kapasitas. Dengan kemahiran sumber daya manusia untuk kemajuan teknologi, PLN akan melakukannya secara konsisten memberikan berbagai layanan pendidikan, termasuk program pelatihan dan pendidikan, baik secara internal maupun melalui kemitraan dengan universitas dan institusi dalam dan luar negeri.

Kenaikan listrik diharapkan akan stabil dan mengikuti pertumbuhan perekonomian nasional yang lebih baik. Karena Indonesia masih dalam tahap awal industrialisasi dan rasio elektrifikasi serta konsumsi listrik per kapita masih rendah, prospek komersial PLN di pasar rumah tangga, industri, dan korporasi masih mewakili potensi ekonomi yang signifikan. Untuk mengimbangi peningkatan tersebut. Dibutuhkan tambahan US\$18,1 miliar untuk mendanai pembangunan jaringan transmisi sepanjang 9.907 km dan kapasitas pembangkit sebesar 15.731 MW sebagai respons terhadap proyeksi peningkatan konsumsi listrik sebesar 10% selama sepuluh tahun ke depan.

Penerapan tujuan Tujuan tata kelola perusahaan yang baik, atau GCG, adalah untuk meningkatkan standar kinerja organisasi. Seberapa baik tata kelola perusahaan diterapkan dan dikelola mempengaruhi betapa pentingnya bagi pemegang saham untuk memiliki akses terhadap informasi yang cepat, akurat, dan tepat. Selain itu, hal ini memenuhi kewajiban perusahaan untuk melaporkan semua informasi terkait kinerja keuangannya dengan segera, akurat, dan transparan. Oleh karena itu, tata kelola perusahaan yang baik (GCG) harus dipandang oleh kedua perusahaan swasta sebagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut meningkatkan nilai dan kinerja bisnis, bukan hanya sekedar gimmick hubungan masyarakat atau aksesoris epele (Tjager, 2003).

Mengingat penelitian tentang “Analisis Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara” menjadi menarik bagi penulis karena ia yang telah diberikannya.

KAJIAN TEORITIS

A. Kinerja Keuangan Perusahaan

Ukuran kinerja keuangan selama periode waktu tertentu dapat dilihat di dalam Laporan laba rugi, neraca, dan laporan pergerakan modal. Dokumen-dokumen ini menguraikan pencapaian yang telah dicapai melalui pekerjaan yang dilakukan seefisien mungkin. Kinerja sering dikaitkan dengan keadaan keuangan bisnis. Karena kinerja adalah ukuran kapasitas perusahaan dalam pengelolaan dan alokasi sumber daya, maka kinerja adalah tujuan penting yang harus dicapai oleh setiap orang bisnis di dunia. Selain itu, tujuan utama tinjauan kinerja adalah untuk mendorong anggota staf mencapai tujuan perusahaan dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kriteria Perilaku dapat dinyatakan dalam rencana formal yang dianggarkan atau sebagai aturan pengelolaan. Kinerja perusahaan merupakan hasil dari beberapa keputusan individu diambil manajemen secara berkala.

B. Good Corporate Governance

Karena berkaitan dengan moral, etika kerja, dan prinsip pekerjaan dengan baik, diikuti dengan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) lebih fokus pada pengendalian dan kerangka peraturan perusahaan dibandingkan pada aktivitas yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan agar tidak merugikan pemangku kepentingan. Banyak penafsiran mengenai apa yang dimaksud dengan GCG yang dikemukakan oleh berbagai pihak, baik dari sudut pandang terbatas maupun luas.

Tata kelola perusahaan didefinisikan oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) sebagai suatu sistem manajemen dan pengawasan dalam suatu bisnis yang bertujuan untuk memaksimalkan kinerja sekaligus meminimalkan kerugian bagi pemangku kepentingan. GCG merupakan isu yang tidak akan pernah hilang dan selalu menjadi perbincangan para akademisi, pelaku bisnis, pengambil kebijakan, dan sebagainya. Banyaknya skandal keuangan di dunia bisnis meningkatkan kesadaran akan GCG. Banyak otoritas dan lembaga yang mengusulkan gagasan GCG sebagai cara untuk memantau dan mengatur kinerja bisnis.

Empat manfaat yang dihasilkan dari penggunaan tata kelola perusahaan: peningkatan kinerja bisnis, kemudahan perolehan dana pembiayaan, pemulihan kepercayaan investor terhadap penanaman modal di Indonesia, dan peningkatan nilai pemegang saham. Komponen-komponen tata kelola perusahaan yang baik meliputi internal yang berasal dari dalam perusahaan, dan eksternal yang berasal dari luar perusahaan (organisasi).

C. Kinerja Perusahaan

Kinerja keuangan mengacu pada upaya sistematis yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mengukur profitabilitasnya dan menilai prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan positif melalui pemanfaatan sumber dayanya saat ini. Hal ini penting untuk menggunakan sumber daya seefektif mungkin dalam menghadapi perubahan lingkungan. Salah satu metode manajemen dapat memenuhi tanggungjawabnya kepada penyandang dana dan mencapai tujuan perusahaan adalah melalui tinjauan kinerja keuangan (Sari.M,2005).

Meskipun terdapat perbedaan definisi kinerja perusahaan di antara para ahli, secara umum mereka sepakat bahwa kinerja perusahaan merupakan kerangka dasar yang memungkinkan suatu organisasi untuk menentukan seberapa baik kinerja anggotanya dan bagaimana kinerja tersebut mempengaruhi tujuan yang perlu dicapai dalam organisasi jangka waktu tertentu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif, mengumpulkan dan menganalisis data untuk menghasilkan deskripsi terorganisir, visual, dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Untuk memperoleh pemahaman secara umum mengenai bagaimana penerapan Good Corporate Governance (GCG) untuk meningkatkan kinerja keuangan pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara, penelitian deskriptif kualitatif dilakukan.

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian data kuantitatif. Angka, bukan kalimat, adalah format data yang digunakan dalam analisis data kuantitatif. Contoh data jenis ini adalah neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan, serta laporan pencapaian skor GCG pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara. Wawancara digunakan untuk mendapatkan hasil tersebut. Selain itu, hasil penelitian tertentu adalah Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif, mengumpulkan dan menganalisis data untuk menghasilkan deskripsi, visual, dan hubungan yang terorganisir antara fenomena yang diselidiki. Untuk memperoleh pemahaman secara umum mengenai bagaimana penerapan Good Corporate Governance (GCG) untuk meningkatkan kinerja keuangan pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara penelitian deskriptif kualitatif dilakukan. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian data kuantitatif. Angka, bukan kalimat, adalah format data yang digunakan dalam analisis data kuantitatif. Contoh data jenis ini adalah neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan, serta laporan pencapaian skor GCG pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara. Wawancara digunakan untuk mendapatkan hasil tersebut. Selain itu, hasil penelitian tertentu juga.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi data Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

Organisasi Bisnis PT. Ketika banyak Pada akhir abad ke-19, perusahaan-perusahaan Belanda membangun fasilitas listrik untuk digunakan sendiri, PLN terlibat dalam industri kelistrikan Indonesia. Perusahaan kelistrikan ini bermula dari sebuah perusahaan swasta Belanda bernama NV. NIGM, yang berpindah dari industri gas ke industri kelistrikan, dan akhirnya menjadi perusahaan publik. Badan Pimpinan Umum

Perusahaan Listrik Negara (BPUPLN) yang bergerak di bidang industri kokas, gas, dan ketenaga listrik menggantikan Biro Listrik dan Gas pada tanggal 1 Januari 1961. Menyusul pembubaran BPU-PLN pada tanggal 1 Januari 1965, dua perusahaan negara didirikan: Perusahaan Gas Negara (PGN) yang menangani gas, dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang menangani ketenaga listrik.

Masa lalu di Sumut bukanlah perkembangan terkini. Jika listrik pertama kali diperkenalkan di Indonesia di wilayah Batavia (sekarang Jakarta) pada tahun 1893, maka Medan baru diperkenalkan listrik tiga puluh tahun kemudian, pada tahun 1923. Fasilitas ini dibangun oleh perusahaan swasta Belanda NV NIGEM/OGEM di lokasi tersebut. bekas kantor PLN Cabang Medan yang saat ini berlokasi di Jl. Listrik No.12 Medan. Sesuai Surat Keputusan Direksi PLN No. Kpts 009/DIRPLN/66 tanggal 14 April 1966 yang menetapkan PLN Eksploitasi Sumatera Utara, PLN Eksploitasi Idipecah menjadi 4 cabang dan 1 sektor: Cabang Medan, Cabang Binjai, Cabang Sibolga, dan Cabang Pematang Siantar (berlokasi di Tebing Tinggi) karena Pematang Siantar masih dalam pengelolaan PLN Sektor Glugur.

Selain itu, Keputusan Menteri tersebut menetapkan pembagian 11 wilayah ekstraksi, 3 wilayah pembangkit, dan wilayah distribusi merupakan kegiatan PLN. PLN eksploitasi I Sumut diubah namanya menjadi PLN eksploitasi II. PT. PLN (Persero) Wilayah Sumut Cabangnya ada di Medan, Binjai, Lubuk Pakam, Pematang Siantar, Rantau Prapat, Sibolga, dan Padang Sidempuan saat ini menjadi unit-unit yang membidangi distribusi tenaga kerja. Kantor pusat wilayah ini berlokasi di Jl. KL. Yos Sudarso No. 284 di Medan.

Peraturan Pemerintah No.23/1994, yang diterbitkan pada tanggal 16 Juni 1994, menetapkan status korporasi PLN. Pada abad kedua puluh satu, PLN harus mampu mengatasi permasalahan yang dihadapinya, memanfaatkan tolok ukur global, dan sangat mandiri dengan manajemen yang berani berpusat pada biaya dan keuntungan, terdesentralisasi, terbuka, dan transparan.

Fungsi produksi dan distribusi yang setelah sebelumnya dibawah pengawasan PT. PLN (Persero) Wilayah II, membagi tugas pengelolaannya kepada PLN untuk pembangkitan dan distribusi di Sumbagut dan mendirikan PT. PLN (Persero) Pembangkitan dan Distribusi Sumatera Utara sebagai organisasi baru yang beroperasi secara independen dari PT. PLN (Persero) Wilayah II. PT. Sedangkan PLN (Persero) Wilayah II fokus pada penjualan dan distribusi energi. PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara menggantikan PT. PLN (Persero) Wilayah II pada tahun 2003.

B. Pembahasan

1. Kinerja Keuangan.

a. Rasio Profitabilitas

1) Return On Equity (ROE)

Metode penghitungan return on equity dan tabel temuannya diperoleh dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara disajikan di bawah ini

$$\text{ROE} = \text{Laba Bersih} / \text{Total Ekuitas} \times 100\%$$

Tabel 1. Perhitungan Return On Equity (ROE)PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara

Tahun	Laba Bersih (a)	Total ekuitas (b)	ROE = (a/b)x100%	Standar BUMN
2011	(1.329.070.778.467)	(1.329.070.778.467)	100%	15%
2012	(4.499.921.960.135)	(4.499.921.960.135)	100%	
2013	(643.278.115.847)	(643.278.115.847)	100%	
2014	(1.471.630.956.130)	(1.471.630.956.130)	100%	
2015	(1.618.794.051.744)	(1.618.794.051.744)	100%	

Sumber : Laporan keuangan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa PT. Return on equity value PLN (Persero) Region Sumut antara tahun 2011 hingga 2015 konsisten mencapai 100%, melampaui patokan yang ditetapkan BUMN sebesar 15%. Berdasarkan temuan tersebut, nilai ROE perusahaan sudah baik. Namun ketika kita memeriksa gambaran sebenarnya, kita menemukan bahwa perusahaan tersebut merugi dan memiliki ekuitas negatif, meskipun nilai nominalnya sama.

Tabel 2.Perhitungan Return On Investmen (ROI) PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera

$$\text{ROI} = \text{Laba Bersih} / \text{Total Aktiva} \times 100\%$$

Utara

Tahun	Laba Bersih (a)	Total aktiva (b)	ROI = (a/b)x100%	Standar BUMN
2011	(1.329.070.778.467)	3.097.782.214.906	-43%	18%
2012	(4.499.921.960.135)	3.288.420.661.601	-137%	
2013	(643.278.115.847)	3.855.486.744.564	-17%	
2014	(1.471.630.956.130)	4.171.601.070.012	-35%	
2015	(1.618.794.051.744)	4.288.761.177.013	-38%	

Sumber : Laporan keuangan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara

Tabel di atas menggambarkan bagaimana PT. Nilai ROI PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara menurun antara tahun 2011 hingga 2015 dan tidak memenuhi persyaratan BUMN sebesar 18%. Dari tahun 2011 hingga 2015, nilai ROI hanya -

Dari 137% hingga -17%, nilai ROI perusahaan berkisar dari terendah di tahun 2012 hingga terendah di -137%.

a. RasioLikuiditas

1) Cash Ratio

Analisis GCG Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara

Rasio kas yang diperoleh PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara antara tahun 2011 hingga 2015 diberikan di bawah ini.

$$\text{Cash Ratio} = \text{Kas dan Setara Kas} / \text{Hutang Lancar} \times 100\%$$

Tabel 3. Perhitungan Cash Ratio PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara

Tahun	Kas dan setara kas (a)	Hutang lancar (b)	Cash Ratio= (a/b)x100%	Standar BUMN
2011	43.923.579.605	475.286.621.425	9%	35%
2012	52.304.089	444.672.859.713	0%	
2013	(9.817.969)	505.611.565.946	0%	
2014	(29.278.042.332)	505.515.293.549	-6%	
2015	(31.205.846.565)	556.066.822.906	-6%	

Sumber : Laporan keuangan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara

Nilai cash rasio yang dicapai PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara antara tahun 2011 hingga 2015 mengalami penurunan dan tidak memenuhi pedoman BUMN 35% seperti diamati pada tabel sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan perusahaan sedang buruk akibat menurunnya kas dan meningkatnya utang.

2) CurrentRatio

Rasio yang disebut rasio lancar digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan utang atau komitmen jangka pendek yang jatuh tempo setelah ditagih seluruhnya. Dengan kata lain, jumlah aset lancar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek yang akan datang. Metode perhitungan Current Ratio dan tabel yang menunjukkan nilai yang dicapai P;T. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara antara tahun 2011 hingga 2015 disajikan di bawah ini:

$$\text{Current Ratio} = \text{Aktiva Lancar} / \text{Hutang Lancar} \times 100\%$$

Tabel 4. Perhitungan Current Ratio PT.PLN(Persero)Wilayah Sumatera Utara

Tahun	Aktiva lancar (a)	Hutang lancar (b)	Current Ratio= (a/b)x100%
2011	285.183.084.024	475.286.621.425	60%
2012	297.005.077.634	444.672.859.713	66%
2013	877.626.338.582	505.611.565.946	174%
2014	1.079.048.088.701	505.515.293.549	213%
2015	1.086.952.897.571	556.066.822.906	195%

Nilai Current Ratio yang dilaporkan oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara selama tahun 2011 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan, terlihat dari tabel diatas. Nilai Current Ratio ini hanya berada di bawah standar BUMN pada tahun 2011–2012 yaitu sebesar 125%. Namun pada tahun berikutnya yaitu Nilai Current Ratio tersebut naik antara tahun 2013 hingga 2015 dan kini berada di atas level BUMN atau di atas 125%.

Good Corporate Governance

Organ BUMN menggunakan kerangka dan prosedur yang dikenal sebagai “tata kelola perusahaan” untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan dan kinerja bisnis guna memaksimalkan nilai pemegang saham jangka panjang dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan. sesuai dengan hukum dan kaidah moral (Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002).

Nilai Corporate Governance PT. PLN (Persero) yang diterima antara tahun 2011 dan 2015 tercantum di bawah ini:

Tahun	Skor GCG	Standar BUMN	Keterangan
2011	83,35%	75%-85%	Baik
2012	81,52%	75%-85%	Baik
2013	88,52%	75%-85%	Sangat Baik
2014	84,62%	75%-85%	Baik
2015	86,46%	75%-85%	Sangat Baik

Sumber : *Report Good Corporate Governance* PT. PLN (Persero)

Predikat “sangat baik” diterima oleh PT. Pendapatan PLN (Persero) yang memiliki skor lebih tinggi dari standar BUMN antara tahun 2011 dan 2015 terlihat dari data di atas.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan oleh PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan tentang tantangan yang dihadapi BPR dalam penerapan good Corporate Governance (GCG) dan penerapan GCG. PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan telah efektif menerapkan dan memenuhi lima prinsip Good Corporate Governance (GCG), yaitu sebagai berikut:

keterbukaan (transparency), akuntabilitas, tanggung jawab (responsibility), independensi (independence), dan kewajaran (fairness). Good Corporate Governance (GCG) telah diterapkan di PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan, dan terbukti bahwa bank tersebut sehat dan mampu mempertanggungjawabkan pengelolaannya yang sehat sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor Penyelenggaraan Good Corporate Governance (GCG) dan Peraturan OJK No.4/POJK.03/2015 tentang Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat diwajibkan bagi Bank Umum berdasarkan 14/8/PBI/2006.

Dengan adanya komunikasi timbal balik antara karena kantor pusat berlokasi di kota metropolitan, asimetri kepentingan dan pelepasan kinerja dapat dikurangi PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan.

Untuk meningkatkan kinerja keuangan PT, telah dilakukan kajian dan analisis skor GCG. Di Wilayah Sumatera Utara (PLN (Persero)), penulis menyimpulkan temuan selanjutnya:

1. Hasil investasi kurang dari patokan 15% dipastikan oleh BUMN. Setiap tahunnya, perusahaan mengalami kerugian sehingga rasio ini tidak sesuai dengan norma. Meningkatnya biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan yang melebihi pendapatannya menjadi penyebab kerugiannya. Dengan kata lain, harga penjualan listrik yang dapat diakses lebih rendah dibandingkan biaya produksi dasar. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis belum mampu menyederhanakan kebutuhan dan beban modal internalnya.
2. Rasio kas masih kurang dari patokan yang ditetapkan BUMN sebesar 35%. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan perusahaan tidak menguntungkan karena menurunnya kas perusahaan dan meningkatnya jumlah utang bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis belum mampu menggunakan dana bisnis untuk menyelesaikan hutang jangka pendek atau jatuh tempo. Hal ini juga disebabkan oleh mekanisme pembayaran tunai di kantor pusat yang membatasi PT. Kemampuan PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara dalam melunasi tagihan-tagihannya yang terhutang.
3. Tidak selalu mungkin untuk memverifikasi rincian efektivitas bisnis secara keseluruhan dalam memanfaatkan GCG untuk meningkatkan kinerja keuangan PT. Wilayah Sumatera Utara (PLN) (Persero).
4. Hal ini ditunjukkan oleh penilaian GCG yang didasarkan pada peningkatan skor, bukan kinerja keuangan bisnis. Hal ini disebabkan sejumlah statistik seperti ROI, Cash Ratio, Inventory Turnover, dan Total Modal Sendiri tidak memenuhi kriteria BUMN.

Untuk Bisnis, harus terus-menerus melakukan tinjauan dan penilaian kinerja. Dalam mengevaluasi kinerja, Anda harus mempertimbangkan banyak masalah yang mungkin timbul sehingga Anda dapat memperkirakan dan menyelesaikan masalah saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bella Novia Rizky (2015).“Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT. Mitra Tani Dua Tujuh”. Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Harahap,W.Agustina.(2016). Analisis Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Kasmir (2012). Analisa Laporan Keuangan. Jakarta : Raja grafindo Persada. Kementrian Badan Usaha Milik Negara Keputusan Menteri BUMN No: Per 10/ MBU /2011. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Jakarta.
- Kementrian Badan Usaha Milik Negara Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep-100/ MBU/ 2002. Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara. Jakarta.
- Kementrian Badan Usaha Milik Negara Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep-117/MBU/2002. Good Corporate Governance. Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance (KNKG). Pedoman Umum Good Corporate (GCG). Jakarta.